

Efektivitas Realisasi Anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Menurunkan Kemiskinan di Kota Cilegon

Sirojul Wahhaj Alfiani¹, Riski Wisnu Prakoso²

^{1,2}Program Studi Manajemen, Universitas Pamulang, Indonesia

e-mail: ¹Wahhajalfianisirojul@gmail.com, ²dosen03035@unpam.ac.id

Corresponding author: Wahhajalfianisirojul@gmail.com

ABSTRAK

Informasi Artikel:

Terima: 20-07-2026

Revisi: 10-08-2026

Disetujui: 20-08-2026

Publish online: 28-08-2026

Laporan magang ini mengkaji efektivitas realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) pada pos Belanja Bantuan Sosial (Bansos) dalam upaya menurunkan tingkat kemiskinan di Kota Cilegon periode 2020-2025. Kemiskinan di kawasan industri Cilegon merupakan masalah struktural yang membutuhkan intervensi kebijakan fiskal daerah yang tepat sasaran. Fokus masalahnya adalah mengevaluasi capaian efektivitas anggaran, menganalisis pola hubungan fluktuasi anggaran dengan tingkat kemiskinan, serta mengidentifikasi tantangan tata kelola penyalurannya. Pengumpulan data dilaksanakan di Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon menggunakan metode observasi partisipatif, kompilasi data sekunder deret waktu (time-series), evaluasi dokumen anggaran, serta wawancara lapangan. Hasil analisis menunjukkan realisasi belanja bansos berfluktuasi; dari Rp4,07 miliar (2020), memuncak menjadi Rp8,23 miliar (2022) sebagai respons pemulihan pascapandemi, lalu mengalami rasionalisasi efisiensi pada kisaran Rp4,46-Rp4,88 miliar (2023-2025). Secara bersamaan, tingkat kemiskinan berhasil ditekan dari puncak 4,24% (2021) menjadi 3,44% (2025). Temuan menegaskan hubungan alokasi bansos dan kemiskinan tidak linier, melainkan dipengaruhi efek jeda waktu (time lag) dan efek ambang batas (threshold effect). Penanggulangan kemiskinan terbukti lebih efektif saat efisiensi anggaran dikombinasikan dengan akurasi sasaran Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan program pemberdayaan ekonomi. Kendala utama tata kelola adalah lemahnya koordinasi lintas instansi akibat ego sektoral (silo mentality), memicu anomali validasi data (inclusion dan exclusion error), serta orientasi pengawasan yang sekadar pada capaian serapan anggaran (output). Kesimpulannya, instansi direkomendasikan membentuk desk koordinasi terpadu lintas sektoral, memperkuat integrasi sistem Single Data secara real-time, mentransformasi skema bansos konsumtif menjadi produktif, dan menerapkan evaluasi berbasis dampak kesejahteraan masyarakat (outcome).

Kata Kunci: Belanja Bantuan Sosial, Tingkat Kemiskinan, Efektivitas Anggaran, Ego Sektoral, Bapperida Kota Cilegon.

ABSTRACT

This study examines the effectiveness of the Regional Revenue and Expenditure Budget (APBD) realization within the Social Assistance (Bansos) expenditure post to reduce the poverty rate in Cilegon City from 2020 to 2025. Poverty in the industrial area of Cilegon is a structural issue that requires well-targeted local fiscal policy interventions. The focus of this research is

evaluating budget performance, analyzing the correlation patterns between budget fluctuations and poverty rates, and identifying governance challenges in its distribution. Data collection was conducted at the Regional Development Planning, Research, and Innovation Agency (Bapperida) of Cilegon City using participatory observation methods, time-series secondary data compilation, budget document evaluation, and field interviews. The analytical results show that the realization of social assistance expenditure fluctuated; starting at IDR 4.07 billion in 2020, peaking at IDR 8.23 billion in 2022 as a post-pandemic recovery response, and subsequently declining to a range of IDR 4.46 billion to IDR 4.88 billion from 2023 to 2025. Concurrently, the poverty rate was successfully suppressed from its peak of 4.24% in 2021 to 3.44% in 2025. The findings confirm that the relationship between social assistance allocation and poverty reduction is non-linear, but rather influenced by time lag and threshold effects. Poverty alleviation proves to be more effective when budget efficiency is combined with targeting accuracy based on the Integrated Social Welfare Data (DTKS) and economic empowerment programs. The primary governance obstacles include weak cross-agency coordination due to a silo mentality, data validation anomalies such as inclusion and exclusion errors, and a supervisory framework that merely focuses on budget absorption outputs. In conclusion, the agency is recommended to establish an integrated cross-sectoral coordination desk, strengthen the integration of a real-time Single Data system, transform consumptive social assistance schemes into productive ones, and implement an evaluation framework based on community welfare impacts (outcome).

Keywords: Social Assistance Expenditure, Poverty Rate, Budget Effectiveness, Silo Mentality, Bapperida Cilegon City.

PENDAHULUAN

Pembangunan ekonomi daerah adalah proses kebijakan yang dilakukan secara terpadu dengan tujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, mengurangi kesenjangan pendapatan, dan menanggulangi kemiskinan sebagai salah satu masalah struktural utama. Sebagai salah satu alat penting dalam pembangunan daerah, Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tidak hanya berfungsi untuk mendukung jalannya pemerintahan, melainkan juga berperan sebagai penggerak ekonomi yang fokus pada perlindungan masyarakat rentan (Wisnu Pradana, 2022). Salah satu wujud nyata pelaksanaan fungsi distribusi fiskal daerah adalah melalui pengalokasian Belanja Bantuan Sosial. Secara konsep, pengalokasian ini bertujuan memberi perlindungan sosial, meningkatkan daya beli masyarakat, dan memutus rantai kemiskinan (Fadhli & Nazila, 2023).

Kota Cilegon merupakan salah satu kawasan industri manufaktur dan petrokimia terbesar di Provinsi Banten yang menunjukkan paradoks pembangunan unik. Di satu sisi, posisinya sebagai kota industri strategis nasional meningkatkan Produk Domestik Regional

Bruto (PDRB) daerah, namun di sisi lain, kantong-kantong kemiskinan perkotaan tetap bertahan (Hermawan & Bahjatulloh, 2022). Evaluasi efektivitas anggaran bansos ini menjadi semakin penting karena fluktuasi ekonomi makro, seperti inflasi daerah dan dampak pascapandemi, sering mengurangi efektivitas nominal bantuan yang diberikan jika tidak didukung oleh perencanaan anggaran yang fleksibel dan berbasis data mikro tentang kesejahteraan Masyarakat (Langi et al., 2023).

Kajian terdahulu yang relevan menunjukkan hasil beragam, seperti studi (Gusti Pratiwi et al., 2022) dan (Meysinta & Aini, 2025) yang menyoroti pentingnya kapasitas fiskal daerah dalam mengurangi kemiskinan, serta studi (Islami Sari & Marissa, 2023) yang menemukan bahwa bansos tidak berpengaruh signifikan secara parsial jika terdapat kendala administratif. Sebagian besar penelitian sebelumnya menggunakan desain data panel provinsi yang menggeneralisasi karakteristik wilayah (Rambe et al., 2022). Artikel jurnal ini bertujuan mengisi kesenjangan riset tersebut dengan mengkaji dinamika khusus struktur ekonomi Kota Cilegon sebagai kota industri pascapandemi melalui pendekatan kuantitatif deret waktu lokal secara mendalam.

METODE PELAKSANAAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif deskriptif dengan metode analisis data sekunder deret waktu (*time-series*) tingkat local (Aisyah Siti, 2023). Kegiatan penelitian dan pengumpulan data dilaksanakan di instansi mitra magang, yaitu Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon, khususnya pada Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia (PPM).

Data primer diperoleh dari observasi partisipatif harian dan wawancara lapangan mendalam (*in-depth interview*) bersama jajaran pegawai serta informan utama di Bidang PPM Bapperida Kota Cilegon. Data sekunder mencakup dokumen Laporan Realisasi Anggaran (LRA) pos Belanja Bantuan Sosial APBD Kota Cilegon serta data angka kemiskinan Kota Cilegon tahun 2020-2025 yang dipublikasikan secara resmi oleh Badan Pusat Statistik (BPS). Tahapan analisis data meliputi kompilasi instrumen fiskal, evaluasi kesesuaian tren realisasi anggaran dengan fluktuasi angka kemiskinan, serta identifikasi hambatan tata kelola kelembagaan secara kualitatif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan data fiskal dan statistik kependudukan yang dihimpun dari Bapperida dan BPS Kota Cilegon, dinamika realisasi Belanja Bantuan Sosial beserta pergerakan

persentase penduduk miskin pada periode 2020-2025 disajikan secara terperinci pada Tabel 1.

Tabel 1. Evaluasi Realisasi Belanja Bansos dan Tingkat Kemiskinan Kota Cilegon 2020-2025

Tahun	Realisasi Belanja Bansos (Rupiah)	Tingkat Kemiskinan (%)	Catatan Evaluasi Lapangan
2020	Rp4.071.757.500	3,69%	Kondisi awal pandemi COVID-19
2021	Rp4.240.760.000	4,24%	Puncak dampak pandemi (lag effect)
2022	Rp8.235.470.000	3,64%	Intervensi masif anggaran (turun 0,60%)
2023	Rp4.883.520.000	3,98%	Rasionalisasi anggaran (kemiskinan naik)
2024	Rp4.466.160.000	3,75%	Optimalisasi sasaran penerima manfaat
2025	Rp4.557.720.000	3,44%	Efisiensi & penyempurnaan (terendah)

Data pada Tabel 1 membuktikan bahwa hubungan empiris antara alokasi belanja bantuan sosial dan tingkat kemiskinan di Kota Cilegon tidak berjalan secara linier konvensional, melainkan dipengaruhi secara kuat oleh efek jeda waktu (*time lag*) dampak kebijakan dan pengaruh ambang batas minimum (*threshold effect*) (Salah et al., 2023). Ketidaksesuaian tren terlihat jelas pada tahun 2021, di mana angka kemiskinan melonjak tajam mencapai puncaknya sebesar 4,24% meskipun anggaran belanja bansos telah ditingkatkan menjadi Rp4,24 miliar. Guncangan eksternal berupa pembatasan mobilitas pandemi membuktikan intervensi nominal bansos yang terbatas belum mampu menahan laju kemiskinan struktural perkotaan secara instan (Agustin & Sumarsono, 2022).

Respons ekspansif barulah terlihat nyata pada tahun 2022, ketika pemerintah daerah melipatgandakan realisasi belanja bansos menjadi Rp8,23 miliar. Langkah taktis ini berhasil memulihkan daya beli masyarakat rentan pascakrisis, terbukti dengan turunnya kemiskinan menjadi 3,64%. Namun, penurunan daya tekan terjadi pada tahun 2023; pemotongan anggaran jaring pengaman menjadi Rp4,88 miliar memicu angka kemiskinan merangkak naik kembali ke posisi 3,98%. Hal ini mengonfirmasi hipotesis lapangan bahwa kemandirian

kelompok ekonomi lemah terhadap uang tunai/barang masih sangat rendah akibat pola penyaluran yang berorientasi konsumtif tanpa pendampingan ekonomi produktif (BADAWI & NUGROHO, 2022).

Dinamika menarik terjadi pada periode 2024-2025. Melalui kebijakan efisiensi dan rasionalisasi fiskal, realisasi anggaran berada pada kisaran Rp4,46-Rp4,55 miliar, namun persentase kemiskinan justru terus menurun hingga mencapai rekor terendah yaitu 3,44% pada tahun 2025. Temuan ini menegaskan bahwa pengentasan kemiskinan di kota industri tidak selalu bertumpu pada peningkatan kuantitas anggaran, melainkan pada penguatan kualitas tata kelola (Luh Putu Manasaputri Indrasawarni & Sri Darma, 2023). Keberhasilan akhir periode ini didorong oleh integrasi data mikro yang lebih bersih serta penyempurnaan program pemberdayaan ekonomi (BellaYuniar Putri DwiKartini, Ayuning Budiati, 2024).

Tantangan Tata Kelola dan Hambatan Lapangan

1. Ego Sektoral (*Silo Mentality*): Alur kerja koordinasi penyaluran jaring pengaman antara Bapperida, Dinas Sosial, Disdukcapil, hingga kelurahan berjalan secara kaku dan terfragmentasi. Pola ini mendisrupsi sinkronisasi pemutakhiran data terpadu (DTKS) sehingga memicu kelambatan pencairan dan memicu kerugian berupa *inclusion error* (salah sasaran) dan *exclusion error* (warga miskin terlewat) (Iskandar et al., 2023).
2. Kelemahan Standar Pengawasan Internal: Evaluasi kedinasan masih tereduksi pada aspek formalitas capaian realisasi fisik dan serapan keuangan (*output*), namun belum menyentuh penilaian dampak riil (*outcome*) peningkatan kesejahteraan rumah tangga penerima manfaat secara berkala (Fardi et al., 2023).



Gambar 1. Kunjungan Lapangan dan Koordinasi Awal di Kantor Kelurahan Taman Baru, Kota Cilegon

Pembahasan

Pembahasan hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas realisasi Belanja Bantuan Sosial di Kota Cilegon tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran, tetapi juga oleh ketepatan sasaran dan kualitas pengelolaannya. Pada tahun 2021, meskipun realisasi bansos meningkat menjadi Rp4,24 miliar, tingkat kemiskinan justru mencapai 4,24%. Kondisi ini menunjukkan adanya *time lag effect*, yaitu dampak kebijakan yang tidak langsung terlihat dalam periode yang sama. Sebaliknya, pada tahun 2022, peningkatan realisasi bansos menjadi Rp8,23 miliar diikuti penurunan kemiskinan menjadi 3,64%, yang menunjukkan kuatnya fungsi perlindungan sosial pada masa pemulihan pascapandemi. Menariknya, pada periode 2024–2025 realisasi anggaran relatif lebih rendah, tetapi tingkat kemiskinan terus menurun hingga 3,44% pada tahun 2025. Temuan ini menegaskan bahwa peningkatan anggaran tidak selalu menjadi faktor utama dalam menurunkan kemiskinan. Efektivitas justru semakin kuat ketika efisiensi anggaran dikombinasikan dengan perbaikan akurasi data penerima dan program pemberdayaan ekonomi. Namun, efektivitas tersebut masih menghadapi kendala berupa ego sektoral antarinstansi, lemahnya sinkronisasi DTKS, serta risiko *inclusion error* dan *exclusion error*. Selain itu, evaluasi program masih berorientasi pada serapan anggaran sebagai *output*, belum sepenuhnya pada dampak kesejahteraan sebagai *outcome*. Oleh karena itu, pengelolaan bansos perlu diarahkan pada integrasi data, koordinasi lintas instansi, dan penguatan bantuan produktif agar mampu menciptakan penurunan kemiskinan yang lebih berkelanjutan.

SIMPULAN

Kebijakan alokasi Belanja Bantuan Sosial di Kota Cilegon sepanjang tahun 2020-2025 secara empiris menunjukkan pola adaptabilitas fiskal yang responsif dan fleksibel dalam menghadapi dinamika krisis makroekonomi. Hasil analisis membuktikan bahwa besaran nominal serapan anggaran tidak memiliki korelasi linear yang instan terhadap penurunan angka kemiskinan perkotaan akibat adanya pengaruh efek jeda waktu (*time lag*) dan efek ambang batas (*threshold effect*) kebijakan. Intervensi fiskal daerah terbukti mencapai efektivitas yang optimal ketika rasionalisasi anggaran dipadukan secara holistik dengan akurasi validasi data penerima manfaat (DTKS) serta adanya pergeseran paradigma, dari bantuan jaring pengaman yang bersifat konsumtif menjadi program pendampingan pemberdayaan ekonomi produktif. Kendati demikian, optimalisasi penanggulangan kemiskinan struktural di kota industri ini masih menghadapi tantangan tata kelola berupa patologi birokrasi, khususnya ego sektoral (*silo mentality*) antarinstansi yang mendisrupsi sinkronisasi pemutakhiran data kependudukan mikro, serta mekanisme pengawasan

internal yang masih tereduksi pada pemenuhan indikator serapan keuangan (*output*) semata tanpa mengukur dampak kesejahteraan riil (*outcome*) di masyarakat.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Cilegon yang telah memberikan izin, fasilitas, dan bimbingan data selama pelaksanaan kegiatan magang ini berlangsung.

REFERENSI

- Agustin, L., & Sumarsono, H. (2022). *Pengaruh Pengangguran, IPM, Dan Bantuan Sosial Terhadap Kemiskinan Di Provinsi Jawa Timur* *Ekonika : Jurnal Ekonomi Universitas Kadiri*. 7(2). <http://ojs.unik-kediri.ac.id/index.php/ekonika>
- Aisyah Siti. (2023). *Sitti Aisyah_70900121031*.
- Badawi, A., & Nugroho, L. (2022). Keberlangsungan Usaha Melalui Peningkatan Kualitas SDM Untuk Menciptakan Prilaku Inovatif Dalam Pengembangan Produk Pada UMKM Kelurahan Meruya Utara. *Akuntansi Dan Humaniora: Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 1(2), 140–144. <https://doi.org/10.38142/ahjpm.v1i2.348>
- Bella Yuniar Putri Dwi Kartini, Ayuning Budiati, J. C. (2024). Penanggulangan Kemiskinan Melalui Strategi Pemberdayaan Usaha Mikro. *Jurnal Niara*, 16(3), 542–551. Tujuan penelitian guna mendeskripsikan bagaimana penanggulangan kemiskinan melalui strategi pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah di kota cilegon dan juga mengetahui faktor pendukung serta faktor penghambat Dinas Koperasi dan UMK Kota Cilegon dala
- Fadhli, K., & Nazila, L. R. (2023). Pengaruh Implementasi Bantuan Sosial Bpnt Dan Pkh Terhadap Efektivitas Penanggulangan Kemiskinan. *Jurnal Education and Development*, 11(2), 196–202. <https://doi.org/10.37081/ed.v11i2.4654>
- Fardi, M., Inka Nusamuda Pratama, Darmansyah, & Amil. (2023). Transparansi Pendataan Program Bantuan Sosial Tunai dalam Penanggulangan Kemiskinan di Lingkungan Bebidas Kelurahan Pegesangan Kota Mataram. *Journal of Social and Policy Issues*, 3, 150–155. <https://doi.org/10.58835/jspi.v3i3.209>
- Gusti Pratiwi, Safuridar Safuridar, & Martahadi Martahadi. (2022). Pengaruh Belanja Bantuan Sosial dan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Tingkat Kemiskinan di Kabupaten Langkat. *Akuntansi*, 1(4), 240–247. <https://doi.org/10.55606/jurnalrisetilmuakuntansi.v1i4.126>
- Hermawan, A. A., & Bahjatulloh, Q. M. (2022). The Influence of Gross Regional Domestic Product (GRDP), Education and Unemployment on Poverty Levels with Zakat as a

- Moderating Variable in Indonesia 2016-2020. *Jurnal Ekonomi Dan Keuangan Syariah*, 5(1), 1-16.
- Iskandar, A. H., Suja'le, A. F., & Agusta, I. (2023). Redesigning Consolidated Data for Handling Extreme Poverty in Rural Areas Based on Sdgs Desa. *Journal of Community Positive Practices*, 23(1), 96-115. <https://doi.org/10.35782/JCPP.2023.1.08>
- Islami Sari, D., & Marissa, F. (2023). Pengaruh Belanja Subsidi, Belanja Hibah dan Belanja Bantuan Sosial terhadap Kemiskinan di Indonesia. *Indo-Fintech Intellectuals: Journal of Economics and Business*, 3(2), 346-359. <https://doi.org/10.54373/ifijeb.v3i2.238>
- Langi, C. R., Zulfikar, A. L., Maulana, I., Widayati, N., & Yudaruddin, R. (2023). The impact of social aid on poverty during the COVID-19 pandemic: Empirical evidence from Indonesia. *Public and Municipal Finance*, 12(2), 104-116. [https://doi.org/10.21511/pmf.12\(2\).2023.09](https://doi.org/10.21511/pmf.12(2).2023.09)
- Luh Putu Manasaputri Indrasawarni, N., & Sri Darma, G. (2023). *Dinas Sosial P3A dalam Graduasi Sejahtera Mandiri Provinsi Bali*. 10, 35-68.
- Meysinta, D. P., & Aini, Z. (2025). Pengaruh PAD, Pendapatan Transfer, Belanja Hibah Dan Belanja Bantuan Sosial Terhadap Tingkat Kemiskinan (Studi pada Kabupaten/Kota di Provinsi Sumatera Barat Periode 2020-2023). *Jurnal EMT KITA*, 9(3), 817-831. <https://doi.org/10.35870/emt.v9i3.3995>
- Rambe, R. A., Purmini, P., Armelly, A., Alfansi, L., & Febriani, R. E. (2022). Efficiency Comparison of Pro-Growth Poverty Reduction Spending before and during the COVID-19 Pandemic: A Study of Regional Governments in Indonesia. *Economies*, 10(6). <https://doi.org/10.3390/economies10060150>
- Salah, A., Tunai, B. S., Tunai, B. S., Utara, K. T., Tunai, B. S., Utara, K. T., Minahasa, K., Talikuran, K., Kabupaten, U., Tunai, B. S., Utara, K. T., Indonesia, P. O. S., Utara, K., Bantuan, P., Tunai, S., Kunci, K., & Tunai, B. S. (2023). *1981-Article Text-8883-1-10-20230830 (2)*. 14(2), 1059-1068.
- Wisnu Pradana, A. (2022). Promoting Participatory Budgeting Practices in Indonesia: Lessons from Malang City. *Policy & Governance Review*, 6(3), 297. <https://doi.org/10.30589/pgr.v6i3.613>